



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jln. Veteran No. 70, Eks Lap. Poliko. Telp (0752) 92601, 92957 Fax (0752) 93279

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)

SKPD : SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN : 2027
ANGGARAN

PROGRAM	Program Perekonomian dan Pembangunan
KEGIATAN	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
SUB KEGIATAN	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
KODE PROGRAM	4.01.03.

ANALISIS SITUASI

1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender).

Sesuai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah yang telah ditindaklanjuti melalui Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa (UKPBJ) merupakan transformasi kelembagaan menjelaskan bahwa UKPBJ Barang/ Jasa agar mampu melaksanakan proses Pengadaan Barang/ Jasa sesuai dengan tujuan, kebijakan, prinsip dan etika Pengadaan Barang/ Jasa.

Pembinaan yang dilakukan dititikberatkan kepada sumber daya manusia di UKPBJ maupun Pelaku Pengadaan Barang/ Jasa baik di Perangkat Daerah Kota Payakumbuh maupun Penyedia Barang/ Jasa. Pemerintah Kota Payakumbuh harus bisa mengantisipasi munculnya isu-isu yang berkaitan dengan perbedaan gender dalam hal keikutsertaan/partisipasi dalam proses pembangunan dan berkaitan dengan kegiatan yang akan dilakukan adalah adanya persamaan hak dan kewajiban sesuai proporsi untuk mendapatkan masukan atau pengalaman pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender Faktor Kesenjangan

Sumber daya laki-laki lebih diutamakan untuk dapat terlibat langsung dalam proses pengadaan barang/jasa dibandingkan sumber daya perempuan

Penyebab Internal

1. Belum pahamnya konsep Gender pada rekanan/penyedia;
2. Adanya kesenjangan SDM, laki-laki lebih banyak yang menduduki jabatan strategis pada perusahaan- perusahaan.

Penyebab Eksternal

1. Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang gender, bahwa gender adalah hanya sebatas mendahulukan perempuan saja;
2. Adanya budaya patriarki yang masih mengutamakan kaum pria dalam hal-hal yang strategis seperti menjadi kepala keluarga,

	pimpinan perusahaan, tokoh masyarakat, dll 3. Hasil konstruksi sosial budaya yang membedakan pembagian peran antara laki-laki dan perempuan terutama untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu	
CAPAIAN PROGRAM	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	
JUMLAH ANGGARAN	Rp. 150.000.000,-	
RENCANA AKSI	Sub Kegiatan	Melaksanakan Pelatihan/ Sosialisasi Pengadaan Barang/ Jasa kepada seluruh pengguna dan penyedia barang/jasa di Kota Payakumbuh tanpa membedakan gender
		Masukan Rp. 150.000.000,-
		Keluaran 1. Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa; 2. Keikutsertaan kaum perempuan dalam Pelaksanaan Pelatihan/ Sosialisasi Pengadaan Barang/ Jasa bagi pengguna/ Penyedia Barang/ Jasa
		Hasil 1. Persentase Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan melalui elektronik; 2. Meningkatnya keikutsertaan dan pemahaman kaum perempuan dalam proses pengadaan barang/ jasa serta ikut berpartisipasi dalam pembangunan.

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH



Drs. RISA ANANDA, M.Si

NIP. 19680607 198809 1 001



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jln. Veteran No. 70, Eks Lap. Poliko. Telp (0752) 92601, 92957 Fax (0752) 93279

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2027

KOLOM 1	KOLOM 2	KOLOM 3	KOLOM 4	KOLOM 5	KOLOM 6	KOLOM 7	KOLOM 8	KOLOM 9
Kebijakan / Program / Kegiatan / Tujuan	Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)	Isu Gender			Kebijakan Dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Tolok Ukur Kinerja/Data Dasar Base Line	Target Kinerja/Indikator Gender
Program : Perekonomian dan Pembangunan	Sesuai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah yang telah ditindaklanjuti melalui Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa (UKPBJ) merupakan transformasi kelembagaan menjelaskan bahwa UKPBJ Barang/ Jasa agar mampu melaksanakan proses Pengadaan Barang/ Jasa sesuai dengan tujuan, kebijakan, prinsip dan etika Pengadaan Barang/ Jasa. Pembinaan yang dilakukan dititikberatkan kepada sumber daya manusia di UKPBJ maupun Pelaku Pengadaan Barang/ Jasa baik di Perangkat Daerah Kota Payakumbuh maupun Penyedia Barang/ Jasa. Pemerintah Kota Payakumbuh harus bisa mengantisipasi munculnya isu-isu yang berkaitan dengan perbedaan gender dalam hal keikutsertaan/partisipasi dalam proses pembangunan dan berkaitan dengan kegiatan yang akan dilakukan adalah adanya persamaan hak dan kewajiban sesuai proporsi untuk mendapatkan masukan atau pengalaman pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah.	Sumber daya laki-laki lebih diutamakan untuk dapat terlibat langsung dalam proses pengadaan barang/jasa dibandingkan sumber daya perempuan	1. Belum pahamnya konsep Gender pada rekanan/penyedia 2. Adanya kesenjangan SDM, laki-laki lebih banyak yang menduduki jabatan strategis pada perusahaan-perusahaan	1. Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang gender, bahwa gender adalah hanya sebatas mendahulukan perempuan saja; 2. Adanya budaya patriarki yang masih mengutamakan kaum pria dalam hal-hal yang strategis seperti menjadi kepala keluarga, pimpinan perusahaan, tokoh masyarakat, dll 3. Hasil konstruksi sosial budaya yang membedakan pembagian peran antara laki-laki dan perempuan terutama untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu	Pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui LPSE diharapkan dapat meningkatkan pemahaman terhadap prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa	Melaksanakan sosialisasi Pengadaan Barang/ Jasa kepada seluruh pengguna dan penyedia barang/jasa di Kota Payakumbuh tanpa membedakan gender	input: Rp. 150.000.000,-	input: Peserta Sosialisasi Pengadaan Barang/ Jasa
Kegiatan: Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa							output: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa;	output: Keikutsertaan kaum perempuan dalam Pelaksanaan Pelatihan/ Sosialisasi Pengadaan Barang/ Jasa bagi pengguna/ Penyedia Barang/ Jasa
Sub Kegiatan : Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa							outcomes: Persentase Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan melalui elektronik;	outcomes: Meningkatnya keikutsertaan dan pemahaman kaum perempuan dalam proses pengadaan barang/ jasa serta ikut berpartisipasi dalam pembangunan
Tujuan : Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa								



SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

Drs. RIFA ANANDA, M.Si
NIP. 19680607 198809 1 001